SENTRI:
Jurnal Riset Ilmiah
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

Vol. 5, No. 10, 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 5392-5404

Determinan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Pontianak: Peran Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

Syf Zulfa[1*], Nella Yantiana[2], Muhammad Fahmi[3], Sari Rusmita[4]
[1,2,3,4]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: Zulfahalwaarkhannizam@gmail.com

Article History:
Received: September 02, 2026
Revised: September 29, 2026
Accepted: October 29, 2026

Keywords:
Budget Absorption; Budget Implementation; Procurement; Budget Planning; PLS-SEM

Abstract: *Budget absorption remains a persistent problem in Indonesian local governments, where spending tends to accumulate in the final quarter and weakens the developmental and economic role of the regional budget. This study examines the effect of budget planning, budget implementation, human resource competence, and procurement of goods and services on budget absorption in the Pontianak City Government. A quantitative explanatory design was applied using an online questionnaire completed by 81 budget managers, such as commitment-making officials, treasurers, and planners, from regional work units (OPD) of Pontianak City. Data were analysed with Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) and 5,000 bootstrap subsamples. The measurement model met the criteria for convergent validity, internal consistency reliability, and discriminant validity. The structural model explained 64.4% of the variance in budget absorption (R^2 = 0.644) and showed medium predictive relevance (Q^2predict = 0.387). Budget implementation had a positive and significant effect on budget absorption (β = 0.356; p = 0.003), and procurement of goods and services also had a positive and significant effect (β = 0.358; p = 0.031). In contrast, budget planning (β = □0.018; p = 0.564) and human resource competence (β = 0.169; p = 0.160) had no significant effect. These findings suggest that, in a city government whose planning documents and staff capacity are already relatively uniform, absorption is decided mainly by execution discipline and procurement timeliness. Local governments should therefore strengthen monitoring of implementation schedules, accelerate disbursement processes, and announce procurement plans early in the fiscal year.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Zulfa, S., Yantiana, N., Fahmi, M., & Rusmita, S. (2026). Determinan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Pontianak: Peran Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(10). https://doi.org/10.55681/sentri.v5i10.7296

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen utama pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Belanja daerah yang terealisasi tepat waktu menggerakkan perekonomian lokal, membiayai pelayanan publik, dan mewujudkan program pembangunan yang telah dijanjikan dalam dokumen perencanaan (Mardiasmo 2018). Karena itu, tingkat penyerapan anggaran lazim dipakai sebagai salah satu indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Kerangka

hukum pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa APBD harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban (Pemerintah Republik Indonesia 2019).

Dalam praktik, penyerapan anggaran di banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan pola yang sama dari tahun ke tahun: realisasi rendah pada semester pertama, lalu menumpuk pada triwulan keempat. Pola ini menimbulkan beberapa persoalan, antara lain tertundanya manfaat program bagi masyarakat, menurunnya kualitas belanja karena kegiatan dikerjakan secara terburu-buru di akhir tahun, serta munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar. Penelitian terdahulu mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab, seperti kelemahan perencanaan, lambatnya pelaksanaan kegiatan, keterbatasan kompetensi pengelola keuangan, dan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa (Wiansyah and Mulyani 2021; Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025).

Pemerintah Kota Pontianak menghadapi tantangan serupa. Sejak diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2019), seluruh perangkat daerah dituntut menyesuaikan proses kerja dengan siklus anggaran yang semakin terdigitalisasi. Perubahan ini menuntut perencanaan yang lebih presisi, pelaksanaan yang disiplin terhadap jadwal, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan proses pengadaan yang tertib sesuai ketentuan (Presiden Republik Indonesia 2021). Namun, belum banyak bukti empiris yang menunjukkan faktor mana yang paling menentukan penyerapan anggaran pada tingkat perangkat daerah di Kota Pontianak.

Temuan penelitian sebelumnya juga belum konsisten. Studi di Kota Payakumbuh menemukan bahwa hanya perencanaan anggaran yang berpengaruh signifikan, sedangkan pelaksanaan anggaran dan kompetensi SDM tidak berpengaruh (Yuniati and Putri 2023). Sebaliknya, penelitian di Direktorat Jenderal Anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dan kualitas SDM berpengaruh signifikan, sementara perencanaan dan pengadaan tidak (Anggita S. and Budi 2023). Penelitian lain menemukan bahwa perencanaan dan kualitas SDM berpengaruh, tetapi pelaksanaan dan pengadaan tidak (Puluala 2021), sedangkan studi di Kota Jambi melaporkan keempat faktor tersebut berpengaruh positif (Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa determinan penyerapan anggaran sangat bergantung pada konteks kelembagaan, sehingga perlu diuji ulang pada setting pemerintah daerah yang berbeda.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang sesuai untuk model prediktif dengan ukuran sampel relatif kecil dan data yang tidak harus berdistribusi normal (Hair et al. 2022). Secara teoretis, penelitian ini menambah bukti empiris tentang determinan penyerapan anggaran dalam perspektif teori keagenan pada sektor publik. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menentukan prioritas perbaikan tata kelola anggaran.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan dan Penyerapan Anggaran

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal yang mendelegasikan wewenang dan agen yang melaksanakan wewenang tersebut (Jensen and Meckling 1976). Dalam konteks pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD bertindak sebagai prinsipal, sedangkan kepala daerah beserta perangkat daerah bertindak sebagai agen yang menerima mandat untuk melaksanakan APBD. Asimetri informasi dan perbedaan kepentingan dapat mendorong agen untuk menunda pelaksanaan kegiatan atau menghindari risiko administratif, sehingga anggaran tidak terserap sesuai rencana. Mekanisme perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang terpantau, SDM yang kompeten, dan pengadaan yang transparan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Penyerapan anggaran adalah realisasi belanja yang dicapai suatu entitas dibandingkan dengan pagu anggaran pada periode tertentu (Mardiasmo 2018). Penyerapan yang baik tidak hanya ditunjukkan oleh persentase realisasi yang mencapai target, tetapi juga oleh kesesuaian realisasi fisik dengan output yang direncanakan, distribusi belanja yang merata sepanjang tahun, pemantauan progres yang berkala, serta penggunaan anggaran yang efisien sesuai prinsip *value for money*.

2. Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah proses penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan dana yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perencanaan yang spesifik, terukur, berbasis kebutuhan riil, selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja, serta disahkan tepat waktu akan mengurangi kebutuhan revisi anggaran di tengah tahun (Pemerintah Republik Indonesia 2019). Dalam perspektif keagenan, perencanaan yang baik memperjelas kontrak kinerja antara prinsipal dan agen sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Sejumlah studi menemukan pengaruh positif perencanaan terhadap penyerapan anggaran (Yuniati and Putri 2023; Puluala 2021; Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025).

H1: *Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

3. Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan anggaran mencakup realisasi program dan kegiatan sesuai jadwal dan DPA, proses pencairan dana melalui mekanisme SPP-SPM-SP2D, pemantauan rutin atas progres pelaksanaan, penanganan kendala, serta penyusunan laporan realisasi secara berkala. Tahap pelaksanaan merupakan titik ketika rencana dikonversi menjadi belanja riil, sehingga hambatan administratif pada tahap ini akan langsung tercermin pada rendahnya realisasi. Penelitian pada Direktorat Jenderal Anggaran dan pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Jambi menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Anggita S. and Budi 2023; Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025).

H2: *Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran

Kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang berkaitan dengan kinerja efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (Spencer and Spencer 1993). Bagi pengelola keuangan daerah, kompetensi meliputi pemahaman regulasi keuangan daerah, penguasaan aspek teknis perencanaan dan penatausahaan, kemampuan menyusun dokumen anggaran, kemampuan mengoperasikan SIPD, serta kedisiplinan dan ketelitian. SDM yang kompeten diharapkan mampu menyelesaikan proses administrasi lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Beberapa penelitian menemukan bahwa kompetensi atau kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Wiansyah and Mulyani 2021; Anggita S. and Budi 2023), meskipun penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan (Yuniati and Putri 2023; Perdana, Mahmud, and Shoalihin 2025).

H3: *Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

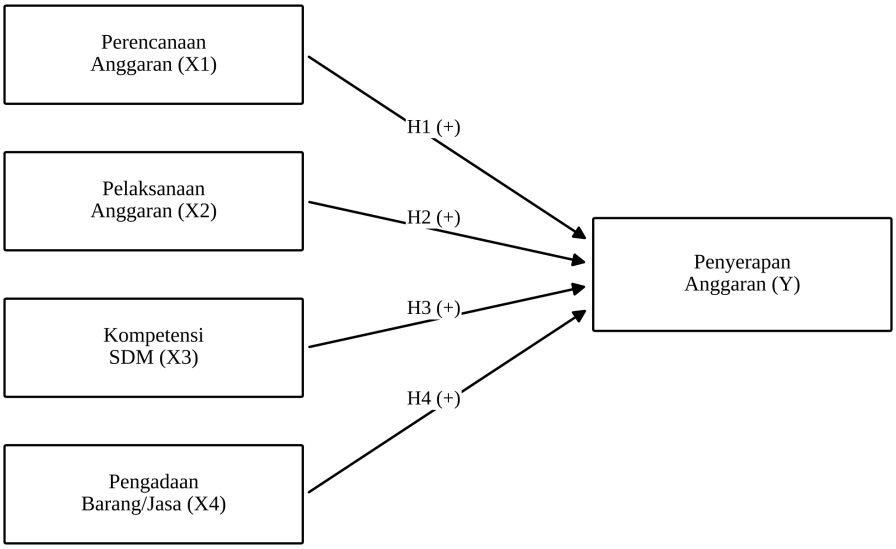
5. Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai APBN/APBD, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan (Presiden Republik Indonesia 2021). Sebagian besar belanja modal dan belanja barang/jasa direalisasikan melalui mekanisme pengadaan, sehingga keterlambatan penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), proses pemilihan penyedia yang berlarut, atau administrasi yang tidak lengkap akan menunda pembayaran. Pengadaan yang terencana, patuh regulasi, kompetitif, dan terdokumentasi dengan baik mempercepat realisasi belanja. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran daerah (Wiansyah and Mulyani 2021; Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025).

H4: *Pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.*

6. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori keagenan dan kajian empiris di atas, penelitian ini memodelkan penyerapan anggaran sebagai fungsi dari empat determinan, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, dan pengadaan barang/jasa. Setiap determinan dihipotesiskan berpengaruh positif secara langsung terhadap penyerapan anggaran. Kerangka konseptual penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

1. Desain, Populasi, dan Sampel

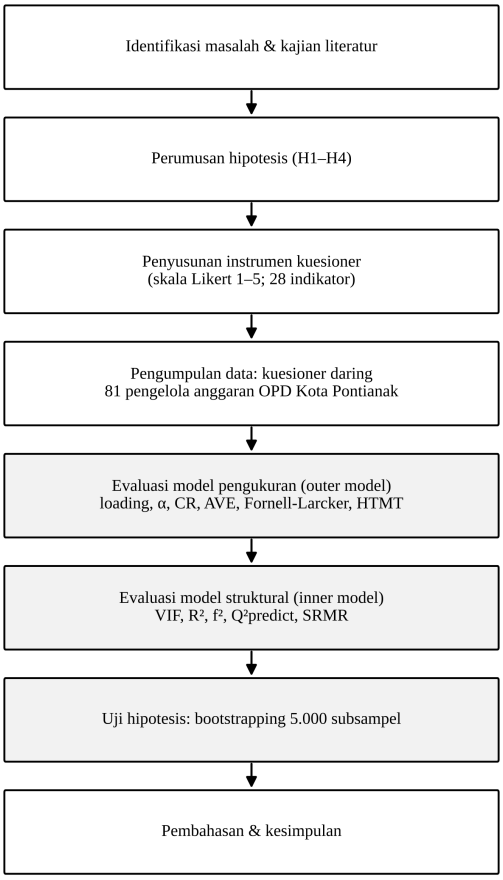
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan kausal antarvariabel (Sugiyono 2019). Populasi penelitian adalah aparatur yang terlibat dalam pengelolaan perencanaan, anggaran, dan keuangan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Sampel dipilih secara purposive dengan kriteria responden terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, atau penatausahaan anggaran, seperti PPK, PPTK, PPK-SKPD, bendahara, perencana, dan analis kebijakan bidang perencanaan dan keuangan. Sebanyak 81 kuesioner terisi lengkap dan seluruhnya layak dianalisis. Jumlah ini melampaui ukuran minimum berdasarkan aturan sepuluh kali jumlah jalur struktural terbanyak yang mengarah ke satu konstruk, yaitu $4 \times 10 = 40$ responden (Hair et al. 2022).

2. Instrumen dan Pengukuran Variabel

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring pada 6-11 Oktober 2026. Seluruh item diukur dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Perencanaan anggaran (X1) diukur dengan lima indikator: perencanaan spesifik dan terukur, pelibatan unit kerja, berbasis analisis kebutuhan riil, keselarasan dengan RPJMD/Renstra/Renja, dan ketepatan waktu pengesahan. Pelaksanaan anggaran (X2) diukur dengan enam indikator: kesesuaian jadwal, kesesuaian dengan DPA, ketepatan pencairan SPP-SPM-SP2D, monitoring rutin, penanganan kendala, dan pelaporan realisasi. Kompetensi SDM (X3) diukur dengan enam indikator: pemahaman regulasi, pemahaman teknis, kemampuan menyusun dokumen anggaran, kemampuan mengoperasikan SIPD, kedisiplinan, serta ketelitian dan inisiatif. Pengadaan barang/jasa (X4) diukur dengan enam indikator: kesesuaian dengan kebutuhan dan RKA, kepatuhan proses pemilihan, ketepatan waktu RUP, kepatuhan regulasi, persaingan yang sehat, dan kelengkapan dokumentasi. Penyerapan anggaran (Y) diukur dengan lima indikator: pencapaian target realisasi, kesesuaian realisasi fisik, pemerataan penyerapan sepanjang tahun, pemantauan berkala, dan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan PLS-SEM dengan algoritma PLS skema *path weighting* dan seluruh konstruk diukur secara reflektif. Analisis dilakukan dalam dua tahap (Hair et al. 2019). Tahap pertama adalah evaluasi model pengukuran (*outer model*), meliputi validitas konvergen (*outer loading* ≥ 0,70 dan AVE ≥ 0,50), reliabilitas konsistensi internal (*Cronbach's alpha* dan *composite reliability* ≥ 0,70), serta validitas diskriminan melalui kriteria Fornell-Larcker (Fornell and Larcker 1981) dan *heterotrait-monotrait ratio* (HTMT) < 0,90 (Henseler, Ringle, and Sarstedt 2015). Tahap kedua adalah evaluasi model struktural (*inner model*), meliputi kolinearitas (VIF < 5), koefisien determinasi (R^2), *effect size* (f^2), relevansi prediktif Q^2predict melalui prosedur PLSpredict sepuluh fold (Shmueli et al. 2019), dan SRMR sebagai ukuran kecocokan model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan *bootstrapping* 5.000 subsampel. Karena seluruh hipotesis bersifat direksional (positif), signifikansi diuji satu arah pada $\alpha = 0,05$. Alur penelitian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Profil responden disajikan pada Tabel 1. Mayoritas responden adalah perempuan (59,3%), berusia 41-50 tahun (45,7%), dan berpendidikan S1 (54,3%). Dari sisi jabatan, kelompok terbesar adalah PPK/PPTK/PPK-SKPD (34,6%) dan penelaah teknis kebijakan bidang perencanaan/keuangan (22,2%). Sebanyak 58,0% responden memiliki

pengalaman kerja di bidang perencanaan, anggaran, atau keuangan minimal lima tahun, sehingga responden dinilai memahami proses pengelolaan anggaran di unit kerjanya.

Tabel 1. Profil Responden (n = 81)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	%
Jenis kelamin	Perempuan	48	59,3
	Laki-laki	33	40,7
Usia	< 30 tahun	8	9,9
	30-40 tahun	20	24,7
	41-50 tahun	37	45,7
	> 50 tahun	16	19,8
Pendidikan	SMA/sederajat	6	7,4
	D3	7	8,6
	S1	44	54,3
	S2	24	29,6
Jabatan	PPK/PPTK/PPK-SKPD	28	34,6
	Penelaah Teknis Kebijakan	18	22,2
	Bendahara	8	9,9
	Analis Kebijakan/Kasubbag	6	7,4
	Perencana	5	6,2
	Pengolah Data dan Informasi	4	4,9
	Lainnya	12	14,8
Masa kerja	< 5 tahun	34	42,0
	5-10 tahun	17	21,0
	> 10 tahun	30	37,0

Sumber: Data primer diolah (2026).

2. Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas 4,00. Perencanaan anggaran memperoleh rata-rata tertinggi (4,24; kategori sangat baik), sedangkan penyerapan anggaran memperoleh rata-rata terendah (4,05; kategori baik). Pada tingkat indikator, skor terendah terdapat pada pernyataan bahwa penyerapan anggaran berjalan merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di triwulan akhir (rata-rata 3,84; simpangan baku 0,80). Temuan ini mengonfirmasi bahwa persoalan utama penyerapan anggaran di Kota Pontianak terletak pada distribusi waktu realisasi, bukan pada pencapaian target akhir tahun. Pada variabel pelaksanaan, skor terendah terdapat pada kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal (4,00), dan pada variabel kompetensi SDM, skor terendah terdapat pada pemahaman aspek teknis perencanaan dan penatausahaan keuangan (3,99).

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Min	Maks	Rata-rata	Simp. Baku	Kategori
Perencanaan Anggaran (X1)	2	5	4.24	0.55	Sangat baik
Pelaksanaan Anggaran (X2)	2	5	4.13	0.48	Baik
Kompetensi SDM (X3)	2	5	4.09	0.56	Baik
Pengadaan Barang/Jasa (X4)	3	5	4.20	0.55	Baik
Penyerapan Anggaran (Y)	2	5	4.05	0.56	Baik

Kategori rata-rata: 1,00-1,80 sangat buruk; 1,81-2,60 buruk; 2,61-3,40 cukup; 3,41-4,20 baik; 4,21-5,00 sangat baik.

3. Evaluasi Model Pengukuran

Hasil evaluasi model pengukuran disajikan pada Tabel 3. Seluruh *outer loading* berada pada rentang 0,764-0,926 sehingga melampaui batas 0,70. Nilai AVE berkisar antara 0,633

dan 0,806, yang berarti setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikatornya. *Cronbach's alpha* (0,882-0,951) dan *composite reliability* (0,912-0,961) juga melampaui 0,70, sehingga seluruh konstruk memenuhi validitas konvergen dan reliabilitas konsistensi internal (Hair et al. 2019).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen dan Reliabilitas

Konstruk	Indikator	Loading	α	CR	AVE
Perencanaan Anggaran (X1)	X1.1	0.862	0.883	0.917	0.687
	X1.2	0.765			
	X1.3	0.820			
	X1.4	0.856			
	X1.5	0.840			
Pelaksanaan Anggaran (X2)	X2.1	0.771	0.882	0.912	0.633
	X2.2	0.809			
	X2.3	0.832			
	X2.4	0.767			
	X2.5	0.830			
	X2.6	0.764			
Kompetensi SDM (X3)	X3.1	0.806	0.932	0.947	0.748
	X3.2	0.870			
	X3.3	0.872			
	X3.4	0.896			
	X3.5	0.873			
	X3.6	0.869			
Pengadaan Barang/Jasa (X4)	X4.1	0.926	0.951	0.961	0.806
	X4.2	0.919			
	X4.3	0.885			
	X4.4	0.897			
	X4.5	0.910			
	X4.6	0.846			
Penyerapan Anggaran (Y)	Y.1	0.793	0.888	0.921	0.701
	Y.2	0.876			
	Y.3	0.776			
	Y.4	0.860			
	Y.5	0.876			

Keterangan: α = Cronbach's alpha; CR = composite reliability; AVE = average variance extracted. Seluruh loading signifikan pada p < 0,001.

Validitas diskriminan disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan kriteria Fornell-Larcker, akar kuadrat AVE setiap konstruk (diagonal) lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain (Fornell and Larcker 1981). Seluruh nilai HTMT juga berada di bawah 0,90, dengan nilai tertinggi 0,883 antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Henseler, Ringle, and Sarstedt 2015). Dengan demikian, setiap konstruk terbukti berbeda secara empiris dari konstruk lainnya.

Tabel 4. Validitas Diskriminan: Fornell-Larcker dan HTMT

Konstruk	X1	X2	X3	X4	Y
Perencanaan Anggaran (X1)	0.829	(0.883)	(0.795)	(0.804)	(0.717)
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.788	0.796	(0.811)	(0.856)	(0.830)
Kompetensi SDM (X3)	0.725	0.736	0.865	(0.841)	(0.759)
Pengadaan Barang/Jasa (X4)	0.738	0.783	0.795	0.898	(0.806)
Penyerapan Anggaran (Y)	0.649	0.746	0.703	0.758	0.837

Keterangan: diagonal = akar kuadrat AVE; di bawah diagonal = korelasi antarkonstruk; di atas diagonal dalam kurung = nilai HTMT.

4. Evaluasi Model Struktural

Hasil evaluasi model struktural disajikan pada Tabel 5. Nilai VIF antarkonstruk eksogen berkisar antara 3,085 dan 3,641, sehingga tidak terdapat masalah kolinearitas yang serius (VIF < 5). Nilai VIF yang berada di bawah 5 tersebut juga mengindikasikan bahwa bias metode umum tidak mendominasi hasil (Kock 2015), meskipun nilainya melampaui batas konservatif 3,3 sehingga tetap perlu dicermati. Nilai R^2 sebesar 0,644 (R^2 *adjusted* = 0,625) menunjukkan bahwa keempat determinan menjelaskan 64,4% variasi penyerapan anggaran, yang tergolong moderat (Hair et al. 2022). Nilai Q^2predict sebesar 0,387 (> 0) menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang memadai (Shmueli et al. 2019). Nilai SRMR sebesar 0,073 berada di bawah 0,08, yang menandakan kecocokan model yang baik. Berdasarkan *effect size*, pelaksanaan anggaran (f^2 = 0,101) dan pengadaan barang/jasa (f^2 = 0,099) memiliki pengaruh kecil yang mendekati moderat, sedangkan kompetensi SDM (f^2 = 0,025) dan perencanaan anggaran (f^2 = 0,000) memiliki kontribusi yang sangat kecil.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Model Struktural

Konstruk eksogen	VIF	f^2	Kategori f^2
Perencanaan Anggaran (X1)	3.085	0.000	Tidak ada
Pelaksanaan Anggaran (X2)	3.536	0.101	Kecil
Kompetensi SDM (X3)	3.155	0.025	Kecil
Pengadaan Barang/Jasa (X4)	3.641	0.099	Kecil
R^2 Penyerapan Anggaran	0.644	R^2 adjusted	0.625
Q^2predict	0.387	SRMR	0.073

Keterangan: f^2 0,02 = kecil; 0,15 = sedang; 0,35 = besar. Q^2predict dihitung dengan PLSpredict 10-fold (10 pengulangan).

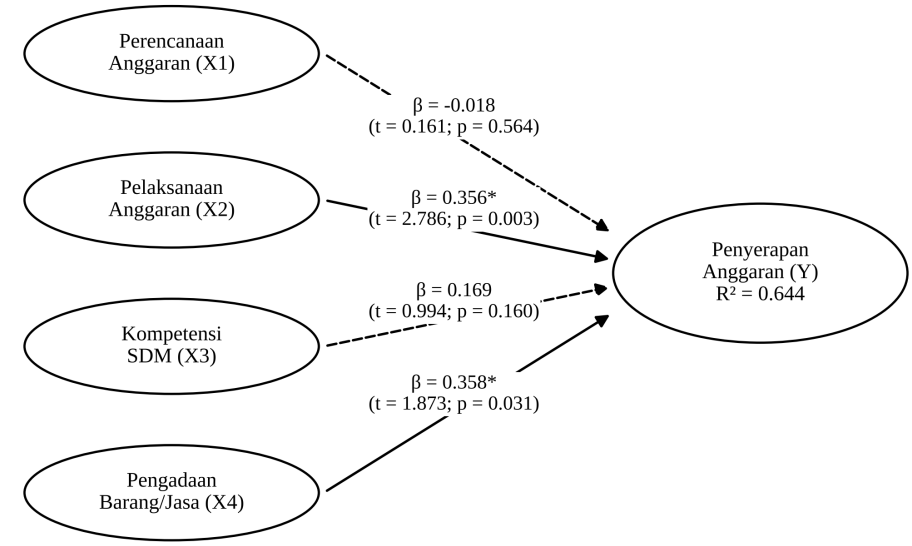
5. Pengujian Hipotesis

Hasil *bootstrapping* disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 3. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (β = 0,356; t = 2,786; p = 0,003), sehingga H2 diterima. Pengadaan barang/jasa juga berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,358; t = 1,873; p = 0,031), sehingga H4 diterima; interval kepercayaan 90% (0,005-0,633) tidak memuat nol. Sebaliknya, perencanaan anggaran (β = □0,018; t = 0,161; p = 0,564) dan kompetensi SDM (β = 0,169; t = 0,994; p = 0,160) tidak berpengaruh signifikan, sehingga H1 dan H3 ditolak.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis (Bootstrapping 5.000 Subsampel)

Hipotesis	Jalur	β	Rata-rata sampel	SD	t	p	Keputusan
H1	X1 → Y	-0.018	-0.013	0.112	0.161	0.564	Ditolak
H2	X2 → Y	0.356	0.373	0.128	2.786	0.003	Diterima
H3	X3 → Y	0.169	0.163	0.170	0.994	0.160	Ditolak
H4	X4 → Y	0.358	0.344	0.191	1.873	0.031	Diterima

Keterangan: p-value satu arah (hipotesis direksional). p-value dua arah: H1 = 0,872; H2 = 0,005; H3 = 0,320; H4 = 0,061.



Gambar 3. Hasil Model Struktural PLS-SEM

6. Pembahasan

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian pada Direktorat Jenderal Anggaran dan DP3A Kabupaten Dompu (Anggita S. and Budi 2023; Perdana, Mahmud, and Shoalihin 2025), tetapi berbeda dengan temuan di Kota Payakumbuh dan Kota Jambi (Yuniati and Putri 2023; Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025). Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kualitas perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak relatif seragam dan sudah dinilai sangat baik oleh responden (rata-rata 4,24), sehingga variasinya tidak cukup untuk membedakan tingkat penyerapan antarunit. Integrasi perencanaan melalui SIPD yang mengunci keselarasan RKA dengan dokumen RPJMD dan Renja juga membuat perencanaan cenderung menjadi prasyarat administratif yang telah terpenuhi (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2019; Tumija and Erlambang 2023). Selain itu, korelasi yang tinggi antara perencanaan dan pelaksanaan (r = 0,788) mengindikasikan bahwa pengaruh perencanaan kemungkinan tersalurkan melalui kualitas pelaksanaan, bukan secara langsung. Dari perspektif teori keagenan, kontrak yang jelas belum menjamin perilaku agen apabila tahap pelaksanaan tidak dikendalikan.

Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini konsisten dengan temuan di Direktorat Jenderal Anggaran dan Kota Jambi (Anggita S. and Budi 2023; Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025). Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, pencairan dana SPP-SPM-SP2D yang tepat waktu, serta pemantauan rutin atas progres kegiatan merupakan tahapan yang secara langsung mengubah pagu menjadi realisasi belanja. Rendahnya skor pada indikator kesesuaian jadwal kegiatan dan pemerataan penyerapan sepanjang tahun menunjukkan bahwa disiplin pelaksanaan adalah titik ungkit utama. Dalam kerangka teori keagenan, monitoring pelaksanaan merupakan mekanisme pengawasan yang mengurangi

asimetri informasi antara pimpinan daerah dan perangkat daerah (Jensen and Meckling 1976).

Pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sejalan dengan hasil penelitian di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Dompu (Yuniati and Putri 2023; Perdana, Mahmud, and Shoalihin 2025). Hal ini tidak berarti kompetensi tidak penting. Mayoritas responden telah berpendidikan minimal S1 dan berpengalaman, sehingga tingkat kompetensi relatif homogen. Kompetensi juga lebih berperan sebagai kapasitas yang memungkinkan pelaksanaan dan pengadaan berjalan baik daripada sebagai penentu langsung realisasi belanja. Ketika pengaruh pelaksanaan dan pengadaan telah diperhitungkan, kontribusi unik kompetensi menjadi kecil ($f^2 = 0{,}025$). Meski demikian, skor terendah pada pemahaman aspek teknis penatausahaan keuangan menunjukkan masih adanya ruang peningkatan kapasitas, khususnya terkait pengoperasian SIPD yang terus diperbarui.

Pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran. Pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini mendukung penelitian di Kota Bogor dan Kota Jambi (Wiansyah and Mulyani 2021; Atiah, Zulfanetti, and Mustika 2025), tetapi berbeda dengan penelitian yang tidak menemukan pengaruh pengadaan (Puluala 2021; Anggita S. and Budi 2023). Sebagian besar belanja barang/jasa dan belanja modal hanya dapat direalisasikan setelah kontrak ditandatangani dan pekerjaan diselesaikan. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyusunan dan pengumuman RUP, kepatuhan proses pemilihan penyedia, serta kelengkapan dokumentasi menentukan kapan pembayaran dapat dilakukan (Presiden Republik Indonesia 2021). Pengadaan yang dimulai lebih awal pada tahun anggaran memberi ruang bagi realisasi yang lebih merata dan mengurangi penumpukan belanja pada triwulan keempat (Fasa and Imtikhanah 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, penyerapan anggaran lebih ditentukan oleh faktor-faktor pada tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dibandingkan oleh faktor-faktor pada tahap persiapan, yaitu perencanaan dan kompetensi SDM. Implikasi praktisnya, perbaikan penyerapan anggaran sebaiknya difokuskan pada penguatan pengendalian jadwal pelaksanaan, percepatan proses pencairan dana, serta percepatan tahapan pengadaan sejak awal tahun anggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Pontianak, sedangkan perencanaan anggaran dan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan. Keempat determinan secara bersama-sama menjelaskan 64,4% variasi penyerapan anggaran dengan relevansi prediktif yang memadai. Secara teoretis, temuan ini memperkaya penerapan teori keagenan pada sektor publik dengan menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian pada tahap eksekusi lebih menentukan perilaku agen dalam merealisasikan anggaran dibandingkan mekanisme pada tahap perencanaan.

Secara praktis, Pemerintah Kota Pontianak disarankan untuk (1) memperkuat monitoring bulanan atas realisasi fisik dan keuangan per OPD dengan target penyerapan triwulanan yang tegas; (2) menyederhanakan dan mempercepat proses SPP-SPM-SP2D melalui optimalisasi SIPD; (3) mendorong penyusunan dan pengumuman RUP serta

pelaksanaan tender lebih awal, termasuk melalui tender dini; dan (4) melanjutkan peningkatan kapasitas teknis pengelola keuangan sebagai pendukung pelaksanaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu ukuran sampel yang relatif kecil, data persepsi yang bersumber dari responden yang sama, dan desain potong lintang. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data realisasi anggaran aktual per OPD, memperluas sampel ke pemerintah daerah lain di Kalimantan Barat, serta menguji peran mediasi pelaksanaan anggaran dalam hubungan antara perencanaan atau kompetensi SDM dengan penyerapan anggaran.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak dan seluruh aparatur pengelola keuangan pada perangkat daerah yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

1. Anggita S., Mayu Sara, and Y. Agus Bagus Budi. 2023. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3 (1): 1339–50. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16016.
2. Atiah, Nur, Zulfanetti, and Candra Mustika. 2025. "Determinants of Budget Absorption in Regional Work Units in Jambi City." *Jambi Accounting Review (JAR)* 6 (1): 39–57. https://doi.org/10.22437/jar.v6i1.48940.
3. Fasa, I. N., and S. Imtikhanah. 2025. "Determinan Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 28 (2): 210–28. https://doi.org/10.35591/wahana.v28i2.973.
4. Fornell, Claes, and David F. Larcker. 1981. "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error." *Journal of Marketing Research* 18 (1): 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104.
5. Hair, Joseph F., G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt. 2022. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE.
6. Hair, Joseph F., Jeffrey J. Risher, Marko Sarstedt, and Christian M. Ringle. 2019. "When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM." *European Business Review* 31 (1): 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203.
7. Henseler, Jörg, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt. 2015. "A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling." *Journal of the Academy of Marketing Science* 43 (1): 115–35. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8.
8. Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–60. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.
9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
10. Kock, Ned. 2015. "Common Method Bias in PLS-SEM: A Full Collinearity Assessment Approach." *International Journal of e-Collaboration* 11 (4): 1–10. https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101.

11. Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
12. Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
13. Perdana, M. J., M. Mahmud, and S. Shoalihin. 2025. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran." *Advances in Management & Financial Reporting* 3 (3): 746–57. https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.601.
14. Presiden Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
15. Puluala, Muhammad Gustavo. 2021. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1 (1): 1–9. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i1.5.
16. Shmueli, Galit, Marko Sarstedt, Joseph F. Hair, Jun-Hwa Cheah, Hiram Ting, Santha Vaithilingam, and Christian M. Ringle. 2019. "Predictive Model Assessment in PLS-SEM: Guidelines for Using PLSpredict." *European Journal of Marketing* 53 (11): 2322–47. https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189.
17. Spencer, Lyle M., and Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons.
18. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
19. Tumija, and Prayoga Arif Erlambang. 2023. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Media Birokrasi* 5 (2): 155–69. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696.
20. Wiansyah, Dheya Rahmani, and Sri Mulyani. 2021. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah." *SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)* 5 (2): 212–28.
21. Yuniati, Helma, and Anne Putri. 2023. "Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9 (5): 1886–99. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1498.